

**MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Rica Milana¹

**¹Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia.
milana@gmail.com**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang mekanisme penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur. Penelitian dilaksanakan selama 4 Bulan (bulan Maret sampai dengan juni 2013) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur Sangatta, yang berkaitan dengan mekanisme penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian dokumen. Narasumber dari penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Sub Bagian Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Timur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada mekanisme penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur meliputi Perencanaan anggaran, penatausahaan dengan pengesahan SPJ dan pelaporan. Temuan lainnya yaitu terdapat kelebihan dan kelemahan dalam Mekanisme Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran No. SE900/316/BAKD. Kelebihannya yaitu hasil pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mudah mengetahui berapa penyerapan dana yang sudah terpakai. Sedangkan kelemahannya biasanya terjadi karena keterlambatan bidang-bidang dalam penyerahan dokumen realisasi penggunaan anggaran dan catatan serta kesalahan dalam memasukkan data pada SIMDA.

Kata Kunci, Mekanisme, laporan realisasi anggaran, Badan Kepegawaian Daerah.

PENDAHULUAN

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur merupakan instansi daerah yang berorientasi kepada urusan Kepegawaian di Lingkungan kabupaten Kutai Timur, dalam melaksanakan tujuannya Instansi perlu perencanaan yang matang agar program Badan Kepegawaian Daerah bisa berjalan dengan baik, dan agar tujuan bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan, karena Badan Kepegawaian Daerah adalah salah satu organisasi pemerintah maka penyusunan laporan keuangan instansi tersebut harus berpedoman dengan mekanisme penyusunan laporan pemerintahan yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran No. SE900/316/BAKD. Untuk melihat penyusunan laporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Kutai timur, apakah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur”.

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan selama 4 Bulan (bulan Maret sampai dengan Juni 2013) pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur yang berkaitan dengan Mekanisme penyusunan laporan realisasi anggaran.

B. Kegiatan Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan berupa observasi, wawancara mendalam dan penelitian

dokumen Pengumpulan Data dan Peralatan Analisis

Data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi ; Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Timur, Struktur Organisasi dan mekanisme penyusunan laporan realisasi anggaran. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik deskriptif/ Interaktif yang menggambarkan tentang mekanisme penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur.

HASIL PENELITIAN

Mekanisme Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kutai Timur

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Adapun secara lebih jelas dalam mekanisme penyusunan laporan realisasi anggaran dapat dilihat dibawah ini :

1. Menyusun RKA
2. Menyusun DPA
3. Menyusun SPD
4. Menyusun SPP
5. Menyusun SPM
6. Menyusun SP2D
7. Menyusun SPJ dan Laporan

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Dalam mekanisme penyusunan laporan realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai

Timur terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam setiap prosesnya, diantaranya:

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
2. SPJ Pengeluaran Fungsional
3. SPJ Fisik berupa :
 - a. Buku Kas Umum (BKU)
 - b. Buku Pajak
 - c. Buku Panjar
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Kas
 - e. Register Penutupan Kas

B. Pembahasan

Mekanisme Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yaitu :

- a. Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA)
Rencana Kerja dan Anggaran disusun oleh setiap SKPD setelah mendapatkan KUA-PPAS dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang dibagikan setiap SKPD. Penyusunan RKA dilaksanakan oleh setiap kegiatan yang ada di masing-masing SKPD khususnya Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Setelah RKA dibuat maka RKA tersebut akan diasistensi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang Terdiri dari Bappeda, Bagian Pembangunan, Bagian Keuangan. Setelah asistensi selesai, maka diterbitkanlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten.
- c. Surat Penyediaan Dana (SPD)
Surat Penyediaan Dana Dibuat oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), dimana setiap SKPD masing-masing akan mendapatkan SPD pertriwulan

yang akan menyediakan dana untuk pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, khususnya di Badan Kepegawaian Daerah.

- d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Untuk meminta uang maka diajukanlah SPP yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, dimana SPP tersebut terdiri dari : Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang Persediaan (TU), Langsung (LS).
- e. Surat Perintah Membayar (SPM)
Setelah SPP dibuat oleh Bendahara Pengeluaran, kemudian bendahara pengeluaran mengajukan kepada PPK-SKPD untuk dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah diajukannya SPP dan SPM oleh SKPD. SP2D ini merupakan Syarat untuk pencairan dana yang diambil oleh Bendahara Pengeluaran di Bank Kaltim Sangatta dengan cek.
- g. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dan Laporan
Setelah Pencairan oleh Bendahara Pengeluaran, maka Bendahara Pengeluaran akan memberikan panjar kepada kegiatan-kegiatan di SKPD dengan mempersiapkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Berupa BKU, kuitansi, nota-nota dan lain-lain. Selanjutnya siklus ini akan berlanjut kembali ke Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Mekanisme Penyusunan Realisasi Anggaran Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran No. SE900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Hambatan yang ditemui dalam Mekanisme Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran yaitu keterlambatan masing-masing bidang dalam mengumpulkan dokumen realisasi anggaran sehingga bagian keuangan SKPD tidak bisa memproses Laporan Realisasi Anggaran. Selain itu, hambatan yang ditemui juga kesalahan dalam memasukkan data di SIMDA.

B. Saran

Setelah mengadakan penelitian dari data yang dikumpulkan, maka ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan :

1. Mengadakan peningkatan atau *workshop* keuangan agar setiap pegawai mengerti dan memahami lebih dalam mengenai penyusunan laporan realisasi anggaran.
2. Melakukan pengarsipan yang rapi dan teratur.
3. Disiplin dalam penyerahan dokumen-dokumen anggaran ke bagian keuangan agar tidak menghambat proses pelaksanaan laporan realisasi anggaran tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006), Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- [2] Soemarso SR "Akuntansi suatu pengantar" edisi keempat penerbit PT. Rineka Cipta.

- [3] Zaki Baridwan, 2004, *Intermediate Accounting*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta
- [4] Sundjaja, Ridwan S dan Inge Berlian, 2002. *Manajemen Keuangan*, Buku I, Edisi Empat, PT. Prenhallindo, Jakarta
- [5] Mardiasmo. 2007. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- [6] Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia Buku 1 (edisi 7)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- [7] Mardiasmo dan Kirana-Jaya,W., 1999, " Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik," *KOMPAK* No 21, Hal: 385-402.
- [8] Yadiani, Winwin. 2010. *Teori Akuntansi*. Kencana. Jakarta.
- [9] Mamesah, D.J.,1995 *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- [10] Arikunto, Suharsmi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rhineka Cipta.
- [11] Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Airlangga University Press.
- [12] Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [13] Sugiyono. 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- [14] Sofyan S Harahap (1999), *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, Edisi ke-2, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Jakarta

Dokumen-Dokumen

- [15] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- [16] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia SE

900/316/BAKD. Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

- [17] Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sumber Internet

www.google.com

www.entrepreneurmuda.com

<http://www.rider-system.net>

